

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Afrika terbagi menjadi beberapa wilayah, salah satunya wilayah Afrika Tengah. wilayah ini mencakup Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo, Gabon, Sao Tome dan Principe, Angola, Chad, Equatorial Guinea (unstats.un.org 2013, p.2). Negara-Negara tersebut mengalami dinamika politik dan keamanan yang tidak stabil salah satunya adalah Republik Afrika Tengah.

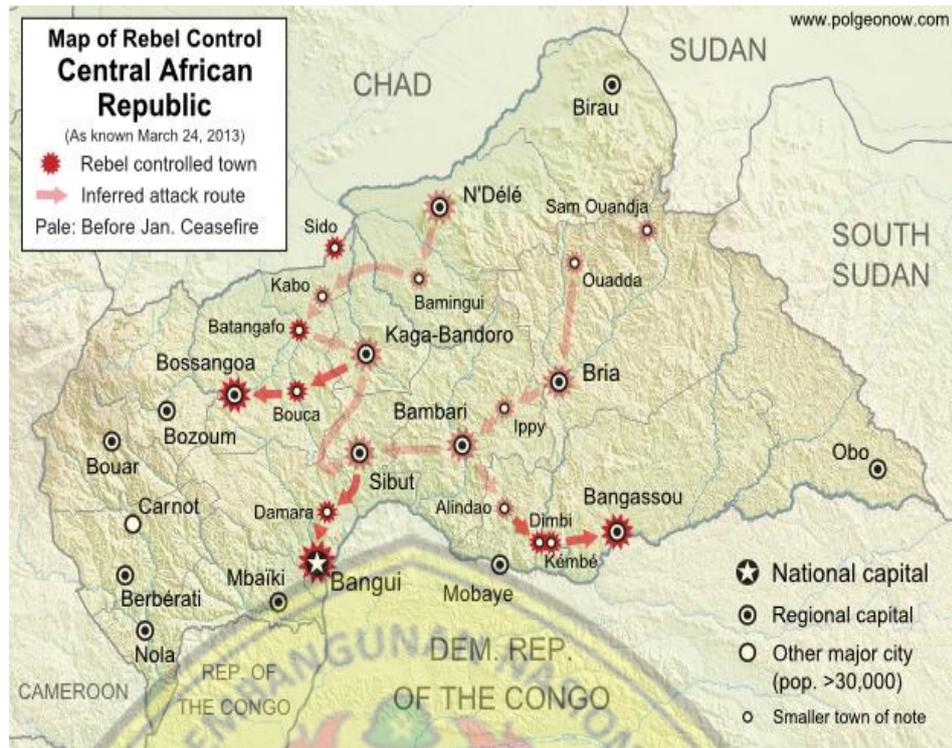
Negara yang mencakup luas wilayah 623.000 km persegi ini memang telah bernasib buruk sejak diberi kemerdekaan oleh Perancis pada tahun 1960 (eoearth.org 2009, p.1). Republik Afrika Tengah mengalami berbagai krisis yang berujung pada konflik di Negara tersebut. Republik Afrika Tengah atau yang disingkat RAT sendiri pada tahun 2010 masuk pada peringkat 10 daftar Negara didunia yang gagal dalam menjalankan pemerintah. Ada beberapa hal yang menjadikan RAT menjadi sebuah Negara gagal, diantaranya kondisi ketidakamanan/*insecurity* yang terjadi di RAT, konflik yang berkepanjangan yang tidak bisa di kontrol oleh Negara nya sendiri berujung pada kondisi keamanan dalam RAT. Lalu krisis politik, keadaan dinamika politik yang tidak stabil didalam RAT sendiri yang memicu terjadinya konflik untuk memegang kendali terhadap otoritas kekuasaan di RAT. Dan buruknya pengelolaan sumber daya bernilai ekonomis dan penguasaan sumber daya oleh Kelompok-kelompok yang ada di RAT yang di gunakan secara sepihak oleh suatu kelompok menjadikan RAT masuk kedalam kondisi Negara gagal (MIRA 2014, p.7). Kondisi di RAT sendiri pada tahun 2013-2014 tengah dalam krisis dimana konflik bersenjata mengeksploitasi keadaan keamanan yang tidak stabil setelah koalisi pemberontak Seleka (FIDH 2014, p.8-9) dalam bahasa lokal berarti aliansi, mengambil alih pemerintah Pusat pada Maret 2013 (Foreign Relation Committee 2013, p.1).

Pada Maret 2013 tersebut, pemimpin pemberontak Seleka Michel Djotodia merebut kekuasaan pemerintahan Presiden terpilih François Bozize yang berkuasa dalam kurun waktu 8 tahun sejak 2007 dan menjadikan Michel Djotodia sebagai pemimpin dari Seleka di Negara kaya sumber daya mineral tersebut. Akibat dari terpilihnya Michel Djotodia sebagai Presiden RAT yang baru mendorong kelompok Anti-Balaka dalam menentang pemerintahan yang baru.

Konflik kekerasan antara dua kelompok di RAT tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi warga Negaranya sendiri. Sekitar 1000 warga sipil telah tewas akibat kekerasan yang bersumber dari konflik tersebut (theguardian.com 2014, p.1). Sementara itu, sekitar 400 ribu orang lebih memilih untuk mengungsi ke Negara Negara tetangga dan pengungsi yang baru terdaftar pun hanya sekitar 145.885 orang, hampir setengah dari populasi yang ada di RAT berkisar 2.5 juta jiwa (fundforpeace.org 2013, p.2).

Konflik yang melibatkan antara kelompok Seleka dan Anti Balaka menjadi konflik antar etnis karena latar belakang dari kelompok tersebut dimana kelompok minoritas. Berawal dari ketidaksukaan terhadap pemerintahan yang baru yang meluas kepada faktor etnis dimana didalam Negara RAT pemegang kekuasaan yang baru berasal dari kelompok minoritas. Dalam konflik ini Terdapat pula faktor ekonomi pula didalamnya. Sejak lama para kelompok minoritas yang notabennya adalah Muslim telah menguasai perdagangan berlian dan emas di RAT, sementara kelompok mayoritas yang notabennya adalah penganut agama Kristen hanya sebagai penambang yang dari emas dan berlian tersebut. kelompok mayoritas merasa bahwa mereka adalah populasi mayoritas dan mereka yang seharusnya menguasai perdagangannya bukan menjadi penambang dari emas dan berlian tersebut. Hal ini lah yang berujung pada korban-korban yang berasal dari etnis etnis tersebut dan secara tidak langsung sebagai mengarah pada pembersihan etnis atas korban yang berjatuhan.

..



umber: <http://www.polgeonow.com>

Gambar 1 Peta Penyebaran Konflik Republik Afrika Tengah

Gambar diatas memperlihatkan bagaimana pola penyebaran konflik yang terjadi yang berawal dari utara Negara bagian RAT. Didaerah tersebut merupakan domisili dari kelompok pemberontakan Seleka. Dimana sebagian besar di kawasan Utara tersebut sebagian besar merupakan Pusat pertambangan emas, berlian, dan sumber mineral lainnya (Raghavan 2014, p.1). Pergerakan yang bergerak dari Utara tersebut mulai meluas ke arah Selatan. Pergerakan tersebut menyerbu kota Bria dimana kota tersebut merupakan kota pertambangan di daerah timur Negara itu. Di Timur terdapat kota Bria yang merupakan kota pertambangan berlian di daerah Timur Negara tersebut. Lalu bergerak kearah Barat menuju kota Bambari dan menuju Ibu kota Bangui. Tentunya dengan aset-aset yang ada di kota-kota yang diduduki oleh kelompok Seleka. Kelompok Seleka juga menguasai daerah Birao dan Ndele dimana daerah ini merupakan daerah kaya akan minyak dan daerah eksploitasi uranium. Perancis pun menghadirkan pasukanya dalam konflik ini salah satunya adalah demi menjaga wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya alam bernilai ekonomi dan yang paling utama adalah bandara dan kawasan bernilai lainya yang berada di Ibukota.

Dimana tempat-tempat ini adalah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan krisis yang memicu konflik di wilayah RAT yang di takutkan akan menyebar ke Negara-Negara tetangganya karena RAT sendiri merupakan Negara *landlock*. Selain faktor kekerasan yang mengakibatkan jumlah populasi di RAT menjadi menurun yang mengharuskan Perancis melakukan intervensi kemanusiaan karena kekerasan yang sudah tidak terkendali akibat konflik dua kelompok tersebut. Lalu reaksi dari Perancis jelas melihat bahwa selain ada faktor dan kejahatan kemanusiaan di RAT juga ada faktor kepentingan ekonomi bagi Perancis karena kota-kota yang menjadi arena pemberontakan merupakan daerah-daerah pertambangan sumber daya mineral baik berupa berlian maupun uranium, sehingga Perancis pun akhirnya bereaksi.

Perancis menaruh perhatian lebih terhadap Republik Afrika Tengah. Kekerasan antara Seleka membuat Perancis berpikir RAT di ambang genosida, seperti yang diungkapkan oleh menteri luar negeri Perancis Laurent Fabius (Irish 2013, p.1). Republik Afrika Tengah (RAT) sendiri menjadi Negara dengan eskalasi konflik yang terus meningkat, hal ini mempengaruhi lingkungan strategis Negara itu dan Negara diluar RAT sendiri khususnya Perancis. Pengaruhnya terhadap Perancis adalah karena konflik tersebut bisa mendestabilisasi Negara-Negara tetangga yang menjaga hubungan komersial dan keamanan dengan Perancis, termasuk Chad, Kamerun, dan Republik Kongo (Gramewood 2014, p.1). Selain kepentingan Perancis terhadap keamanan, Perancis sendiri di Afrika mempunyai kepentingan infrastruktur, mineral, perbankan dan lain-lain. Untuk di RAT kepentingan Perancis terkonsentrasi terhadap sumber daya uranium yang dimiliki serta sumber daya mineral seperti berlian yang ada di RAT dan kepentingan politiknya adalah membuat Negara-Negara bekas koloninya masih bergantung pada Perancis dalam atau interdependensi Negara-Negara di Afrika Tengah terhadap Perancis.

Pada 5 Desember 2013, Presiden Perancis François Hollande mengumumkan keputusannya untuk memperkuat pasukan Perancis di RAT untuk mencegah bencana kemanusiaan seperti pembantaian massal, dan mengatakan pada media bahwa Dewan Keamanan PBB telah mengamanatkan dan memberikan keputusan terhadap Perancis dalam penurunan tentaranya di RAT untuk memberikan keamanan dan memulihkan stabilitas di RAT (Ministry of Defence, France Government, 2013).

The situation in the Central African Republic has become alarming, and even terrifying. Massacres are being committed there at this very moment, even in hospitals, he said. "Each day women and children are attacked and millions of displaced people are seeking shelter." He said it was France's "duty" to act. (Clashes in Central African Republic as UN authorises French intervention 2013, p.1)

Pernyataan Hollande tersebut bertepatan dengan serangan terhadap Ibu kota RAT yaitu Bangui yang dilakukan oleh Anti Balaka. Ratusan orang di persenjatakan dengan parang, roket, granat dan senjata untuk menyerbu Ibu kota Bangui (LCDH 2014, P.5). Dan dalam serang ini penduduk sipil menjadi sasaran dari serangan yang dilakukan oleh kelompok Anti Balaka. Hal ini buntut dari pemerintahan baru yang dikuasai oleh kelompok Seleka. Dan serangan tersebut merupakan dari titik tolak dari konflik atas dua kelompok tersebut. Pemerintahan transisi RAT yang baru dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih sendiri bukan dari proses demokrasi atau pemilihan umum. Pemerintahan yang baru tersebut tidak mau menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum bersenjata di RAT yang nantinya akan menimbulkan penyebaran dan peningkatan konflik. Sehingga membuat Perancis mengerahkan pasukan militernya untuk mengatasi hal tersebut. Reaksi Perancis tersebut menarik untuk dibahas khususnya di periode 2013-2014, karena pada sebelumnya pada tahun 2012 di masa kepemimpinan Presiden Francois Bozize pernah meminta bantuan Perancis untuk memukul mundur kelompok Seleka, namun tidak mendapatkan jawaban dari Perancis (bbc.com 2012, p.1).

Tidak adanya jawaban tersebut karena ada masalah terkait kerja sama yang dilakukan dimana ada kebuntuan terkait kerja sama penambangan uranium yang dilakukan oleh Perancis dan juga kerja sama energi yang dilakukan oleh RAT dan China. Ketika Perancis menaruh perhatian terhadap kepentingan ekonomi di Afrika seperti minyak, infrastruktur dan lain lain dimana kehadiran China tersebut telah menurunkan pendapatan Perancis yang di peroleh dari aspek-aspek tersebut di afrika (Eads 2014, p.1). Perancis malah bereaksi pada saat terjadi bentrokan antara Seleka dan Anti Balaka serta sesudah Presiden Michael Bozize lengser.

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan Perancis sendiri menghadirkan pasukannya di RAT menjadi sebuah strategi yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan konflik di Negara tersebut. Pemberontakan yang muncul akibat pemerintahan Presiden Michel Djotodia sendiri seakan “lepas tangan” terhadap kelompoknya yang tidak lain adalah Seleka. Tidak adanya kontrol terhadap kelompok yang ada mengakibatkan konflik menyebar luas dan berdampak pada aset-aset berharga di RAT lalu tipe konflik berubah ke arah dimensi etnis agama, hal ini berkaitan dengan latar belakang agama antara dua kelompok tersebut. Kekerasan yang semakin menyebar ke dimensi etnis tersebut mengakibatkan kekerasan terhadap warga sipil yang mempunyai keyakinan yang sama atas dua kelompok tersebut. Sekitar 1000 warga sipil telah tewas akibat kekerasan yang bersumber dari konflik tersebut (theguardian.com 2014, p.1). Perancis sendiri hadir dengan intervensi militernya yang didukung oleh PBB. Dengan adanya Ketidakstabilan keamanan di RAT akan berdampak terhadap Negara-Negara di sekitarnya selain kewajiban untuk melindungi dan bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Negara tersebut, dan tentu Perancis ingin melindungi aset-aset penting di Negara tersebut. Jadi disini penulis menyimpulkan dengan melihat dari latar belakang dan kondisi di Republik Afrika Tengah dengan adanya konflik yang terjadi yang menjadi membuat Perancis melakukan intervensi terhadap kondisi keamanan yang ada di Republik Afrika Tengah dan muncul pertanyaan penelitian “**Bagaimanakah respon dari Perancis terhadap konflik antara Seleka dan Anti Balaka di Republik Afrika Tengah periode 2013-2014?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengetahuan tentang perkembangan konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah khususnya konflik antara Seleka dan Anti Balaka.
- b. Menjelaskan tentang dampak yang terjadi akibat konflik antara kelompok Seleka dan Anti Balaka terhadap kondisi Negara di Republik Afrika Tengah
- c. Berupaya mengkaji respon Perancis dan upaya-upaya yang dilakukan Perancis dalam merespon konflik kelompok Seleka dan Anti Balaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan data dalam ilmu Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dan respon Perancis terhadap konflik tersebut
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat di manfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan respon Perancis terhadap konflik Seleka dan Anti Balaka yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menghadirkan beberapa tinjauan tinjauan pustaka yang di lakukan oleh peneliti lain terkait dengan judul yang diambil oleh penulis. Yang pertama penelitian *Thierry Vircoulon, The Central African Crisis, Al Jazeera Center for Studies, 30 april 2014* (Vircoulon 2014) dalam penelitian ini Thierry Vircoulon mengemukakan faktor-faktor tentang penyebab Republik Afrika Tengah menjadi sebuah Negara gagal. Beberapa yang menjadi latar belakang krisis yang terjadi adalah faktor ekonomi, konflik etnis dan transisi pemerintahan.

Krisis ekonomi yang terjadi Republik Afrika Tengah ditandai dengan jumlah perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri telah jatuh dari yang berjumlah 250 hingga menyusut menjadi hanya 25 perusahaan asing dan pada tahun 2012, pada krisis yang sudah melanda hanya ada satu perusahaan tambang sana. Perusahaan itu merupakan korban dari penjarahan yang selama ini dilakukan pemberontakan Seleka. Dan telah menghentikan kegiatan perusahaan tersebut dalam hal eksplorasi sehingga secara drastis menurunkan tingkat perekonomian yang ada di Republik Afrika Tengah.

Faktor konflik etnis transisi pemerintah dan gangguan politik internal Republik Afrika Tengah. Sejak kemerdekaan, lingkaran kekuasaan telah didominasi oleh kelompok etnis Kristen. Presiden berturut-turut (Dacko, Bokassa, Kolingba, Patasse dan Bozize) beragama Kristen, meskipun dua dari mereka. Populasi Muslim secara historis adalah minoritas, namun mendominasi provinsi Utara, termasuk Vakaga, yang, pada masa penjajahan, dipandang sebagai pinggir ekstrem Negara. Oleh karena itu, adanya Seleka itu adalah hal yang mengejutkan, dan dianggap mengganggu sistem politik yang mewakili kelompok etnis dari Barat dan Pusat, serta kekuatan militer tradisional. demonstrasi sering berubah menjadi kekerasan massa terhadap sentimen Muslim dan anti-Muslim. transisi pemerintahan tersebut yang akhirnya bermuara pada konflik etnis yang terjadi di republik Afrika Tengah. Chad dan Perancis hadir dalam intervensi militernya Chad dan Perancis keduanya memiliki pasukan di Afrika Tengah. Meskipun variabel, kehadiran militer Perancis telah hampir tidak terputus sejak kemerdekaan, sementara kehadiran Chad ada akhir 1990-an. Pasukan Chad telah hadir baik di dalam misi Uni Afrika. Setelah mempertahankan kehadiran militer untuk mengamankan Bandara di Bangui pada saat kemenangan Seleka dan menguasai pemerintahan, Perancis memutuskan untuk meluncurkan operasi perlucutan senjata, yang dikenal sebagai Operasi Sangaris, yang dimulai pada awal Desember dan sekarang total sekitar 2000 orang.

Perbedaannya dengan penelitian saya adalah tinjauan di atas menjelaskan RAT menjadi sebuah Negara gagal dan penelitian ini membahas bagaimana pengaruh kelompok Seleka menjadi sebuah faktor menurunnya perusahaan asing yang ada di RAT. Akibat dari dampak penurunan perusahaan tersebut ekonomi di RAT mengalami kemunduran. RAT sebagai Negara ketiga atau Negara berkembang masih sangat membutuhkan pihak luar dalam menjalankan kegiatan ekonominya hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni didalam pengelolaan kegiatan perekonomian. Dan apabila kegiatan perekonomian di kuasai oleh suatu kelompok tertentu yang ada di RAT seperti misalkan Seleka akan menjadi monopoli sendiri bagi kelompoknya dan sebagian besar di gunakan untuk mendanai persenjataan bagi kelompok tersebut agar kelompok tersebut bisa mempertahankan daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. lalu jurnal ini hanya membahas apa yang menjadi faktor penyebab dari krisis berkepanjangan yang terjadi di Republik Afrika Tengah, lalu pada hal 7 disebutkan bahwa motif Perancis dan Chad dalam intervensi militernya. Kedua Negara memiliki motivasi yang sangat berbeda untuk mempertahankan kehadiran militer di Republik Afrika Tengah. Untuk Chad, itu adalah respon dalam membela baik keamanan dan kepentingan ekonomi. Namun disini dijelaskan bahwa Perancis tidak mempunyai kepentingan yang signifikan dalam keamanan maupun kepentingan ekonomi untuk Perancis. Intervensi lebih merupakan akibat dari tekanan dari lobi kemanusiaan (kebanyakan organisasi Internasional di Republik Afrika Tengah adalah orang Perancis pada tahun 2013) dan permintaan bijaksana dari Negara-Negara tertentu di kawasan Afrika Tengah sementara saya menjelaskan bagaimana reaksi Perancis terhadap konflik Seleka dan Anti Balaka di Republik Afrika Tengah dengan menyakini ada motif lain pula selain intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Perancis. bukan hanya sekedar intervensi kemanusiaan. Kesamaannya adalah bahwa krisis terjadi akibat dari pemerintahan yang buruk dan munculnya konflik etnis antara minoritas Muslim dengan mayoritas Islam.

Lalu penelitian oleh jurnal *Yossef Bodansky, The Central African Republic ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 256 Dec 2013* (Bodansky 2013) penelitian ini membahas tentang operasi militer Perancis di Republik Afrika Tengah, operasi tersebut dinamakan Operasi Sangaris. Operasi ini merupakan operasi gabungan antara militer Perancis dengan MISCA atau singkatan dari *The African-led International Support Mission to the Central African Republic*. Perancis dalam hal ini lebih menekankan kepada kepentingan Perancis dalam sumber tambang uranium yang ada di Republik Afrika Tengah. konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dianggap mengganggu kepentingan Perancis dalam mencapai kepentingan objektifnya. Pemerintahan Perancis yang dipimpin oleh Hollande mempertegas kehadiran Perancis di Republik Afrika Tengah dengan pasukan militernya akibat transisi pemerintahan dengan Presiden Djotodia yang merupakan pemimpin pemberontak Seleka dan mengambil alih pemerintahan pada musim semi 2013 dengan harapan pembangunan kembali akibat krisis yang terjadi akibat masa pemerintahan lampau yang dipimpin oleh Presiden Francois Bozize. Pemerintahan yang baru tersebut telah gagal menjalankan sistem pemerintahan dan menyisakan krisis-krisis sosial ekonomi dan konflik konflik perang saudara yang membuat keamanan yang tidak stabil. Padahal dalam pemerintahan yang baru ini Presiden Djotodia tidak di beri kesempatan untuk membangun kembali Republik Afrika Tengah atas apa yang terjadi. Padahal Djotodia sudah berjanji dengan dunia Internasional dalam reformasi sosial ekonomi yang akan dilakukan, namun nampaknya konflik konflik perang saudara malah makin memperburuk pemerintahan yang dipimpin Djotodia apalagi ditambah dia merupakan pemimpin pemberontakan Seleka yang merupakan koalisi dari berbagai kelompok suku yang ada di Republik Afrika Tengah. Perancis sendiri memperkuat militernya di Republik Afrika Tengah dengan mengerahkan 1600 pasukannya dengan Operasi Sangaris nya atas apa yang terjadi dengan pemerintahan Djotodia adalah sebuah genosida dengan melakukan pembantaian atas warganya sendiri. Namun hal itu lebih kepada alih Presiden Hollande dalam mengamankan tambang fosfat yang ada di tenggara dengan Republik Afrika Tengah tepatnya didaerah Bakouma.

Dengan kisaran fosfat uranium yang terkandung berjumlah 41 juta pon, tertinggi dari pada yang berlokasi di Namibia. Pergantian pemerintahan Francois Bozize dengan Michael Dlotodla membuat Perancis takut dan panik karena Bozize sangat dekat dengan Perancis dan sering memuluskan kegiatan Perancis di Republik Afrika Tengah. Lebih tepatnya Bozize adalah boneka Perancis.

Disisi lain harapan baru akan pemerintahan Republik Afrika Tengah yang dipimpin oleh Dlotodla sekedar cuma janji atas *collapse* yang terjadi, situasi dalam negeri malah makin memburuk dengan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan yang menegaskan kepentingan kelompok tertentu yang berupa kepentingan suku-suku tertentu yang memunculkan perang saudara yang lebih besar. Perbedaan dalam jurnal ini dengan topik yang saya bahas, salah satunya adalah jurnal ini membahas kepentingan Perancis, dimana kepentingan Perancis disini adalah intervensi kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab Perancis untuk melindungi sebaga bagian dari masyarakat Internasional, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB. Namun dibalik itu penelitian yang saya bahas juga membahas reaksi Perancis terhadap konflik Seleka dan Anti Balaka karena pada tahun 2012 Perancis diminta bantuan oleh RAT akan konflik nya dengan kelompok Seleka namun tidak di gubris, lalu pada 2013 Perancis malah menerjunkan pasukan militernya ke Negara tersebut. Jadi bukan sekedar hanya membantu Republik Afrika Tengah dalam menyelesaikan konflik namun lebih kepada kepentingan Perancis sendiri dalam mengamankan sumber daya alam yang ada didaerah Republik Afrika Tengah dimana daerah-daerah yang merupakan basis dari Kelompok-kelompok pemberontak merupakan daerah-daerah yang menjadi Pusat pertambangan. kekhawatiran terjadi ketika pergantian kekuasaan Presiden Bozize dengan Presiden Dlotodla yang merupakan pemimpin dari organisasi pemberontakan Seleka yang dianggap secara sepihak mengambil alih kekuasaan resmi yang dipegang oleh Bozize. Namun disisi lain pemerintahan yang baru juga tidak berdampak baik pada kemajuan yang ada di Republik Afrika Tengah.

kekuasaan yang ada malah makin memperkuat kepentingan pribadi atas suku suku yang tergabung dalam Seleka yang menghadirkan krisis sosial ekonomi yang tak kunjung berakhir, dilema akan intervensi Perancis hanya sekedar kepentingan Nasional Perancis belaka namun disisi lain pemerintahan yang dipimpin oleh Djotodia tidak menghasilkan apa apa dalam kemajuan dan perkembangan Negara itu sendiri sehingga perlu kehadiran pihak Internasional dalam membantu krisis dan konflik yang di timbulkan.

Walaupun persamaannya adalah kepentingan Perancis sendiri di Republik Afrika Tengah dengan latar belakang energi, sedangkan jurnal ini membahas apa yang terjadi di dalam pemerintahan Presiden Djotodia tidak berjalan dan baik, dan kehadiran pasukan Perancis sendiri lebih terhadap bagaimana mengamankan sumber sumber energi dengan penghalangnya berupa konflik-konflik antar suku dengan an yang terjadi di wilayah-wilayah di Republik Afrika Tengah. perbedaan semakin terlihat dengan melihat bagaimana jurnal ini menjelaskan kedua pihak tidak bisa menyelesaikan konflik baik dari segi intervensi Perancis sendiri yang dimana malah menimbulkan konflik-konflik baru yang tidak pernah terjadi di Republik Afrika Tengah sebelumnya maupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Afrika Tengah sendiri yang malah dengan terpilihnya Djotodia menjadi Presiden munculnya grup kekerasan yang bernama *Anti Balaka* dengan menyerang minoritas Muslim yang ada di Republik Afrika Tengah dengan kasus pemerkosaan terhadap para wanita minoritas Muslim menjadikan krisis yang ada semakin parah dan sulit untuk diminimalisir. Kedua hal tersebut dijadikan seperti kedua pihak sama sekali tidak mempunyai jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi.

Dan yang terakhir adalah penelitian **Annette Weber, Markus Kaim, Central African Republic in Crisis “African Union Mission Needs United Nations Support”, German Institute for International and Security Affairs, march 2014.** (Weber & Kaim, 2014), Dengan melihat apa yang sedang terjadi di Republik Afrika Tengah Negara ini sedang mengalami krisis yang terbilang sudah semakin parah apalagi dengan munculnya Seleka sebagai kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintahan Francois Bozize yang muncul pada Desember 2012 yang merupakan aliansi militan Muslim yang memunculkan kelompok garis keras lainnya yang bernama anti Seleka yang berisi mayoritas Kristen yang menentang aksi-aksi yang dilakukan oleh Seleka karena mayoritas didominasi Muslim yang mengakibatkan perang saudara dan etnis antara Muslim dengan Kristen sehingga memunculkan krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah sendiri dalam arti pembantaian antar etnis terus meningkat. Di perburuk dengan pemerintahannya sendiri tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, walaupun Republik Afrika Tengah sendiri mempunyai sumber daya alam yang sangat bernilai seperti berlian dan bijih-bijih mineral lainnya tetap tidak bisa menghindarkan Republik Afrika Tengah dari kategori 10 Negara termiskin di dunia.

Pergeseran konteks keamanan yang pada awalnya dari keamanan yang bersifat ancaman bersenjata dari para kelompok-kelompok radikal bersenjata beralih menjadi lemahnya sosial masyarakat sehingga menyebabkan gesekan gesekan antar etnis yang menjadi faktor kuat dalam krisis keamanan dan krisis sosial politik ekonomi yang ada di Republik Afrika Tengah. Bangui sebagai Ibukota Republik Afrika Tengah menjadi tempat dimana Seleka dan Anti Balaka bertempur dan menjadikan Ibukota dalam situasi mencekam. Untuk meningkatkan keamanan di Bangui intervensi dilakukan Perancis dan MISCA (*Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite Africaine*) pada Desember 2013 dengan jumlah 2.300 pasukan Perancis dan 5.400 pasukan MISCA.

Struktur pemerintahan yang lemah menjadikan salah satu faktor kuat bagaimana Republik Afrika Tengah sendiri bisa terperangkap dalam situasi krisis yang berkepanjangan yang berujung pada konflik etnis. Setelah merdeka dari Perancis pada 1960 pemerintahan yang dipilih selalu melalui cara cara kudeta militer tanpa pernah melakukan pemilihan secara demokratis. Hal ini menjelaskan lemahnya sosial masyarakat dalam ikut andil dalam pemerintahan yang berlangsung. Dengan mengandalkan militer pergantian pemerintahan. Dengan sistem tersebut yang merujuk pada sistem yang otoriter menjadikan penguasa penguasa yang hanya berkepentingan terhadap apa yang di mau saja tanpa melihat kebutuhan Negara secara komprehensif.

Dalam krisis ini peran aktor aktor Internasional mampu mereduksi eskalasi konflik. Dengan aktor regional yang berperan dalam hal ini dan akan sangat menentukan. Seperti peran ECCAS (*Economic Community Central African States*) yang mempraksai negosiasi perdamaian yang juga mempunyai MICOPAX (*Mission Consolidation Peace in Republic Central Africa*). Peran Perancis memang mendominasi namun tidak membawa banyak perubahan karena keterkaitan Republik Afrika Tengah yang merupakan bekas koloni Perancis dan tidak cocok menjadi mediator yang netral bagi Republik Afrika Tengah dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dimensi kemanusiaan disini sudah sangat parah seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Mon bahwa Republik Afrika Tengah sedang “terjun bebas” dalam pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran hak asasi manusianya.

Perbedaan akan jurnal ini dengan topik yang saya bahas adalah, jurnal ini menjelaskan dan menyakini kalau keikutsertaan aktor regional dan komitas regional akan membawa pengaruh yang cukup baik dalam mengurangi konflik yang terjadi. Pengaruh Perancis dilihat tidak akan membawa pengaruh apa apa karena Perancis merupakan bekas Negara yang pernah mengkoloni Republik Afrika Tengah dengan bukti warisan kolonial Perancis terhadap Republik Afrika Tengah tidak berdampak dalam kemajuan dan kemandirian sistem pemerintahannya.

Komunitas regional dan dimensi-dimensi aliansi lainya seperti ECCAS harus lebih banyak mengambil peran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. dalam hal 4-6 jurnal ini menganalisa peran peran dimensi aliansi dalam menyelesaikan konflik, seperti AU (*AFRICAN UNION*), PBB dan ECCAS. Dengan mandat yang diberikan oleh PBB operasi kemanusiaan yang dilancarkan atau disebut MISCA namun mempunyai keterbatasan dalam peningkatan kegiatan dalam solusi konflik di Republik Afrika Tengah. Aliansi aliansi yang dilakukan harus bersifat bantuan kemanusiaan dan bantuan lainya apabila dilakukan oleh komunitas regional dan PBB dan lebih merujuk ECCAS sebagai mediator dalam konflik yang terjadi.

Sementara dalam topik saya menekeankan bagaimana upaya aktor Negara Perancis dalam menyelesaikan konflik yang ada di Republik Afrika Tengah. dan saya menganalisis keterlibatan komunitas regional hanyalah sebagai jalan kemudahan bagi Perancis dalam intervensinya dalam konflik etnis yang terjadi akibat buruknya sistem pemerintahan Djotodia dan konflik yang terjadi akan membahayakan warga Negara Perancis yang ada di Republik Afrika Tengah khususnya di Bangui yang merupakan Ibukota dari Republik Afrika Tengah yang mempunyai infrastruktur penting dimana banyak warga Negara Perancis disana.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Responsibility to Protect

Responsibility to Protect mempunyai prinsip dasar yaitu : (ICCIS 2001, p.12)

- a) Kedaulatan Negara menyiratkan tanggung jawab, dan tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya terletak pada Negara itu sendiri
- b) Dimana suatu populasi mengalami bahaya serius yang dikarenakan akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi atau kegagalan Negara, dan Negara tersebut tidak bersedia atau tidak menghentikan bahaya tersebut, merupakan tanggung jawab Internasional untuk melindungi dari bahaya tersebut.

Responsibility to protect merupakan doktrin melindungi, dimana doktrin ini menyatakan bahwa setiap Negara individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimana akan bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan (endgenocide.org 2015, p.1). Masyarakat Internasional melalui PBB memiliki tanggung jawab dalam melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan warga yang terkena dampak melalui dewan kemananan yang tercantum dalam piagam PBB di bab 4 dimana ketika otoritas setempat yang dimana otoritas ini adalah Negara berdaulat yang harusnya beratanggung jawab atas Negara mereka sendiri telah gagal dalam melindungi populasi mereka terhadap kejahatan tersebut (endgenocide.org 2015, p.1).

Lalu *responsibility to protect* mempunyai 3 tanggung jawab khusus yang mencakup :

- a. *Responsibility to prevent* (mencegah) : mengatasi akar penyebab atau penyebab langsung konflik internal dan krisis yang menempatkan suatu populasi dalam resiko bahaya
- b. *Responsibility to react* (bereaksi) : menanggapi situasi dengan langkah langkah yang tepat yang dapat mencakup langkah langkah koersi seperti sanksi, tuntutan dunia Internasional, dalam kasus extreme dilakukanya intervensi militer
- c. *Responsibility to rebuild* (membangun) : menyediakan bantuan penuh untuk pemulihan, rekonstruksi dan rekonsiliasi terutama setelah dilakukanya intervensi yang dimana intervensi tersebut dirancang untuk menghentikan maupun mencegah.

Dalam penelitian yang saya bahas kaitanya dengan *responsibility to protect* adalah penelitian saya melihat Perancis sebagai bagian dari dunia Internasional dan seperti yang ada dalam prinsip dasar *responsibility to protect* dimana apabila keadaan suatu Negara tidak lagi sanggup menindak aksi-aksi kekerasan dalam Negaranya sendiri Negara luar berhak melindungi populasi yang ada di Negara tersebut terhadap ancaman konflik yang terjadi di Negara tersebut.

Dalam kasus ini adalah konflik kelompok Seleka dan Anti Balaka yang menyebabkan populasi masyarakat disana menjadi terancam bahayanya dan konflik ini juga membuat para warga Negara yang ada di RAT mengungsi ke Negara-Negara tetangga RAT agar terhindar dari konflik tersebut.

Konsep ini juga akan menjelaskan bagaimana suatu intervensi dilakukan karena situasi sudah sangat memburuk yang dimana tujuan intervensi ini adalah mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan, lalu bereaksi dimana reaksi ini merupakan aksi-aksi yang dilakukan dalam mencegah konflik dan dengan langkah langkah tepat, lalu melakukan pemulihan atau rekonstruksi dalam intervensi tersebut. Dan Perancis pun hadir dengan intervensinya terhadap konflik yang sedang berlangsung. tujuannya adalah mencegah konflik tersebut menjadi sebuah genosida, lalu bereaksi atas konflik tersebut, reaksinya adalah menurunkan pasukan militer ke daerah-daerah konflik dan daerah daerah bernilai yang dimana tujuan Perancis agar tidak di kuasi oleh satu kelompok tertentu selain dari kepentingan Perancis sendiri agar tetap mengamankan kegiatan perekonomiannya di RAT sendiri.

1.6.2 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan Nasional menjelaskan bahwa kelangsungan suatu Negara akan bertahan apabila Negara tersebut dapat memenuhi kepentingannya. Negara akan berjalan dengan stabil dan baik jika Kepentingan Nasional tercapai, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kepentingan Nasional merupakan tujuan dasar dan faktor yang menentukan dalam merumuskan kebijaksanaan luar negeri. Daniel S.Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, ideologi, kekuatan militer, keamanan Nasional, moralitas dan legalitas (Papp 1988, p.29). Yang tentu setiap Negara berbeda-beda dalam mewujudkannya. Kepentingan Nasional juga merupakan keseluruhan sistem nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu Negara terhadap Negara lain.

Kepentingan Nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negeri, dimana kepentingan Nasional tidak hanya menentukan pilihan dalam mengambil keputusan bagi pertimbangan strategis untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga menentukan pilihan skala prioritas politik suatu Negara (Nasution 1983, hlm.32).

1.6.3 Teori Konflik

Teori konflik yang didefinisikan oleh Johan Galtung berfokus pada era modern, dimana konflik merupakan suatu dampak dari ketidaksepakatan (*incompability*) antara tujuan dan nilai yang diperoleh aktor dalam suatu sistem sosial. Setiap aktor berinteraksi dengan pihak lain dengan harapan dan tujuan, serta konflik bisa terjadi jika tujuan dan harapan tidak tercapai karena tidak ada adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat konflik (webel & Galtung 2007, p.14-15). Ada dua bentuk proporsi yang dibuat oleh Galtung, pertama adalah **Perilaku Konflik** (*Conflict Behaviour*), perilaku ini cenderung pada perilaku destruktif yang disebabkan oleh situasi ketidak sepakatan yang lebih cenderung menimbulkan frustasi dan agresi serta yang kedua **Perilaku Destruktif** yang cenderung mengalami *Self-Reinforcing* untuk membentuk kekerasan lainnya (webel & Galtung 2007, P.14-15).

Konflik merupakan sifat gigih dan sesuatu yang meresap antar kelompok dan kompetisi Internasional diantara kepentingan yang berbedadan nilai nilai yang mendasari dinamika kekuasaan (Jeong 2008, p.5). yang dalam hal ini perbedaan pendapat dan kepentingan yang terjadi antara Seleka dan Anti Balaka menimbulkan Konflik yang berujung pada krisis dan dampak-dampak yang merugikan bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan politik di RAT yang membuat RAT dalam kondisi tidak bisa menguasai pemerintahan dan kondisi didalam negerinya dengan baik sehingga di perlukan bantuan atau campur tangan dari luar.

I.6.3.1 Konflik Etnis

Salah satu fungsi dasar Negara modern adalah untuk memberikan keteraturan internal dan keamanan dalam Negara tersebut. Posen (1993), Snyder (1993), dan Saideman (1998) menekankan munculnya anarki adalah hasil dari lemahnya suatu Negara. Krisis ekonomi yang parah, tekanan demografis, kerusakan infrastruktur dan lemahnya pelayanan publik, konflik eksternal, atau konflik internal antara para aktor mengenai legitimasi yang ada atas pemerintahan yang dapat merusak kemampuan Negara untuk menjamin keamanan dalam wilayahnya (Lobel & Mauceri 2004, p.3). Sehingga apabila semua itu terjadi suatu Negara akan dianggap sebagai Negara gagal.

Melemahnya struktur kelembagaan Negara akan menciptakan rasa tidak aman pada bagian kelompok etnis. ketika otoritas Pusat menurun, kelompok-kelompok yang ada menjadi takut akan keberlangsungan hidup mereka. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kelompok etnis akan melihat ke cara mereka sendiri untuk perlindungan terhadap diri terhadap kelompoknya sendiri. tidak ada jaminan keamanan akan status politik mereka, keamanan ekonomi dan bahkan keamanan fisik mereka.

Ada dua tipe konflik etnis yang pertama difusi (penyebaran) dan eskalasi konflik. Eskalasi bisa terjadi akibat Kelompok etnis luar bergabung dengan konflik internal etnis yang sedang berlangsung saat mereka memiliki peluang. Dimana otoritas Pusat atau pemerintah baru-baru ini kolaps (yaitu, persaingan dilancarkan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda untuk kontrol Negara), kelompok etnis luar akan mengambil keuntungan dari jendela kerentanan dan kesempatan untuk menangkap rampasan. Sementara difusi dilema keamanan etnis dapat menyebabkan eskalasi dan penyebaran etnis konflik (Posen, 1993). Dengan runtuhnya struktur Negara, kelompok etnis akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri, berlatih *self-help*, untuk memastikan keamanan mereka. Langkah-langkah di dalam negeri dapat dilihat sebagai ancaman oleh kelompok etnis lain, Hasilnya bisa menjadi spiral permusuhan aksi dan reaksi, sehingga difusi konflik. Jadi penyebaran akan yang terjadi bisa membuat tingkatan konflik etnis terus meningkat (Lobel & Mauceri 2004, p.4).

Kaitanya dengan penelitian ini adalah konsep ini menjelaskan bahwa munculnya pemerintahan yang baru yang dimana pemerintahan yang baru tersebut malah dirasa menjadi ancaman bagi kelompok lain, dalam hal ini pemerintahan yang baru di pimpin dari kelompok Seleka yang merupakan minoritas etnis di RAT. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kelompok etnis akan melihat ke cara mereka sendiri untuk perlindungan terhadap diri terhadap kelompoknya sendiri. tidak ada jaminan keamanan akan status politik mereka, keamanan ekonomi dan bahkan keamanan fisik mereka, seperti munculnya kelompok Anti Balaka atas pemerintahan yang baru karena merasa bahwa kelompok minoritas ini tidak menjamin keamanan dan status politik mereka karena perbedaan keyakinan yang di anut.

Lalu dengan munculnya struktur Negara yang baru dalam hal ini kelompok Seleka menjadi pemegang kuasa atas sistem pemerintahan kelompok lain akan mengambil langkah *self help* karena untuk memastikan keamanan mereka, hal ini lah yang dilakukan oleh kelompok Anti Balaka karena mereka mengganggu Seleka sebagai ancaman terhadap domnasi mereka apalagi Seleka merupakan golongan minoritas jadi konsep ini akan menjelaskan bagaimana konflik antara Seleka dan Anti Balaka yang muncul akibat lemahnya struktur lembaga Negara. Dan konflik ini bukan lagi hanya menjadi konflik antar etnis, eskalasi konflik dan penyebaran konflik antar kelompok ini sudah menyebar ke aspek aspek lain yang mempengaruhi kondisi keamanan di RAT dan Negara sekitarnya

1.6.4 Resolusi Konflik

Menurut Galtung, terdapat tiga tipe dalam mentransformasi konflik ke damai, yaitu *peace keeping*, *peace making*, dan *peace building* (Jamil 2007, hlm 71).

- a. *Peacekeeping* sebagai usaha menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung, setidaknya meminimalisir hingga sekecil mungkin serta terus menerus dan cenderung bersifat reaktif dengan tujuan mengurangi situasi yang buruk dari konflik yang difokuskan pada akar masalah konflik.

Peacekeeping digunakan secara fleksibel, juga sebelum atau sesudah kekerasan langsung episodik yang mencegah atau mitigasi kekerasan *episodic*. *Peacekeeping* secara tradisional fokus pada manajemen, lebih dari resolusi konflik.

- b. *peacekeeping* merupakan intervensi pihak ketiga (seringkali berupa kekuatan militer meski tidak selalu demikian) ikut membantu semua pihak dalam proses transisi dari konflik kekerasan menuju perdamaian dengan memisahkan dan menjauhkan pihak-pihak yang bertikai untuk menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Hal ini berkaitan dengan upaya Perancis dalam mengerahkan operasi militer atas konflik yang terjadi antara Seleka dan Ant Balaka karena konflik yang terjadi tidak bisa di hentikan oleh Pemerintah RAT sendiri.
- c. *Peacemaking* merupakan usaha nyata menyelesaikan konflik destruktif, kadang melalui proses seperti negoisasi, arbitrase, dan mediasi. *Peacemaking* lebih bersifat reaktif dan proaktif yang berfokus pada upaya menghilangkan dasar-dasar konflik. *Peacemaking* merujuk pada serangkaian tindakan yang mengurangi kemungkinan kekerasan episodik. *Peacemaking* lebih menekankan non-kekerasan atau prevensi kekerasan, cenderung proaktif, muncul dari adanya kekerasan langsung yang aktual, bersifat temporal dan spasial, serta adanya kepentingan *status quo*.
- d. *Peacebuilding* mengembangkan kondisi-kondisi yang mendukung keadilan sosial dan hubungan damai, menjadi sebuah proses proaktif yang jangka panjang. *Peacebuilding* memiliki dimensi kultural, politik, dan ekonomi. Secara kultural *peacebuilding* mensyaratkan transformasi naratif budaya atau keyakinan-keyakinan yang menjustifikasi dan legitimasi dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Secara politik *peacebuilding* terjadi ketika sistem politik yang menekan orang ditransformasi sehingga ada kesempatan equal bagi suara dan representasi politik. *Peacebuilding* meliputi transformasi struktur ekonomi yang mengeksplotasi dan deprivasi sumber daya manusia bagi pertumbuhan serta perkembangan optimal sehingga setiap orang memiliki material yang cukup seperti rumah, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Peacebuilding penting untuk menyelesaikan ketidakseimbangan struktural yang mendeprivasi manusia baik itu pilihan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tetapi *peacebulding* juga esensial untuk menghilangkan dasar kekerasan langsung yang terstruktur. *Peacebuilding* melibatkan level individualisme hingga perubahan institusional dan komunitas yang berdasar pada penyelesaiannya.

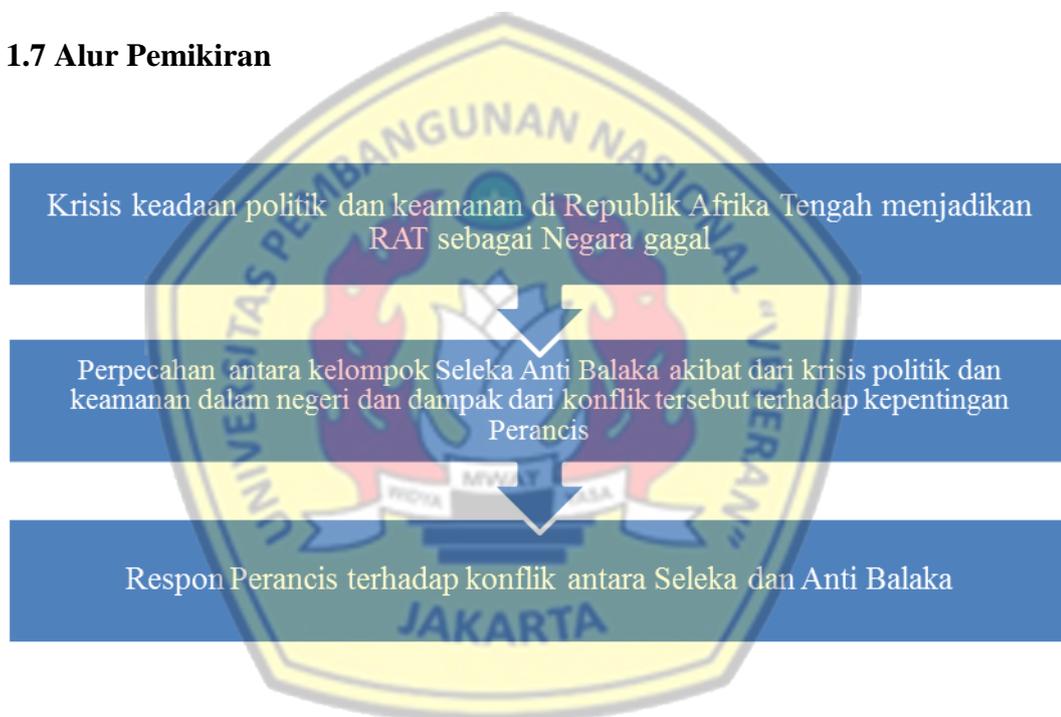
1.6.3 Respon sebagai pola Aksi Reaksi

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan. Respon juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik atau tidak baik sebelum adanya pemahanman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka terhadap serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Respon terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat dikatakan adanya pola aksi reaksi yang membentuk sebuah respon.

Dalam Hubungan Internasional, pola aksi reaksi ini terlihat dalam interaksi yang dilakukan oleh sebuah Negara. Negara merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan Internasional. Dapat dikatakan bahwa Negara memiliki peranan penting terhadap interaksi yang terjadi di dalam dunia Internasional. Hubungan Internasional yang terjadi antar Negara pada dasarnya tercipta karena adanya ketergantungan (interdependensi) antar aktor dalam masyarakat Internasional, sehingga tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang dapat menutup diri dari dunia luar (Perwita & Yani 2005, hlm.2-4). Dalam interaksi antar Negara terdapat hubungan pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, Negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respon, manifestasi dalam hubungan dengan Negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah Negara lainnya agar menerima keinginannya (Perwita & Yani 2005, hlm.41).

Masuk kedalam penelitian saya, konsep ini merupakan konsep yang akan menjelaskan bagaimana respon Perancis sebagai pola aksi reaksi terhadap konflik yang terjadi, melihat hubungan antara Negara dalam dunia Internasional sebagai ketergantungan dalam kasus ini RAT merupakan Negara yang masih sangat tergantung dengan pihak luar, khususnya Perancis karena hubungan masa lalu mereka dimana RAT merupakan bekas Negara koloni Perancis. Di tambah RAT sendiri tidak bisa mengendalikan konflik yang ada di negerinya sendiri. Jadi sangat kecil kemungkinan RAT untuk menolak kehadiran Perancis yang merespon konflik tersebut karena kondisi keamanan yang sudah tidak stabil.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metode penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini ada beberapa metode metode yang bisa di gunakan dalam penelitian ini. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan terhadap kata kata kunci yang di gunakan dalam melakukan penelitian dan bukan pada pencarian data secara kuantitatif dalam mengumpulkan data-data penunjang dalam penelitian.

Sifat dari penelitian kualitatif adalah konstruksionis, induktif serta interpretatif walaupun tidak semuanya di gunakan sifat dari penelitian tersebut bisa hanya salah satu dari sifat penelitian tersebut. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang di teliti oleh penulis, dalam kasus ini masalah yang di teliti adalah respon/reaksi Perancis terhadap konflik yang ada di Republik Afrika Tengah selama periode 2013-2014 dengan melakukan kajian mendalam terhadap literatur- literatur yang ada.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian deskriptif, yang dimana dalam jenis penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana Perancis melakukan reaksinya dalam terhadap konflik yang terjadi di republik Afrika Tengah, lalu konflik seperti apa yang terjadi di Republik Afrika Tengah sehingga Perancis turun tangan dalam konflik tersebut, lalu penulis juga akan menjelaskan bagaimana dampak dari reaksi terhadap keamanan di RAT.

1.8.2 Jenis Data

Berbagai macam data di gunakan untuk penelitian ini, salah satunya data primer. Data ini didapat melalui dokumen dokumen Negara yang di keluarkan oleh pemerintah perancis melalui kementerian yang terkait seperti kementerian luar negeri Perancis dan kementerian pertahanan Perancis. Sedangkan data sekunder didapat melalui observasi pustaka dari buku buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian yang di teliti. Selain itu, data sekunder juga didapat melalui pencarian dari saluran saluran berita baik media cetak maupun media elektronik.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah di jelaskan diatas, data premier didapat melalui dokumen dokumen yang di keluarkan oleh pemerintah Perancis melalui kementerian yang terkait dan pemerintah Republik Afrika Tengah. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan atau library research yang di lakukan oleh penulis di berbagai tempat perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Nasional dan kepustakaan lainnya. Lalu dengan melakukan Studi secara online atau *online research* dengan mengakses situs situs berita maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.9 Sistematika Pembabakan

Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian menjadi 4 bagian yang disusun dalam 4 bab

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II DINAMIKA KONFLIK YANG TERJADI DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Bab ini berisi tentang konflik yang terjadi di republik Afrika Tengah, bagaimana pola konfliknya, bersumber dari mana dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan faktor dari lemahnya pemerintahan yang ada dalam menjaga kondisi keamanan yang ada, ekonomi, serta politik di republik Afrika Tengah.

BAB III RESPON PERANCIS TERHADAP KONFLIK ANTARA SELEKA DAN ANTI BALAKA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana reaksi Perancis sebagai aktor luar yang mempunyai pengaruh terhadap negara bekas jajahannya di Afrika khususnya di Republik Afrika Tengah terhadap konflik yang terjadi antara kelompok Seleka dan Anti Balaka di Republik Afrika Tengah.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta sekaligus menjadi penutup penulis dalam melakukan penelitian.

